

**EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PROGRAM
PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF DI PUSKESMAS RIMBO KEDUI
KABUPATEN SELUMA**

Oleh :

Achmad Gilang Pribadi Achir¹, Henny Aprianty², Bobby Mandala Putra³

¹²³Program Studi Administrasi Publik FISIPOL Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu,
Indonesia

Informasi Artikel

Tulisan dikirim
Tanggal 19-Juli-2024

Tulisan direvisi
Tanggal 01-November-2024

Tulisa diterima Kembali
tanggal 10-Desember-2024

Korespondensi penulis

Email :
gilangpribadi2102@gmail.com

Kontak Seluler:
+62 895-4229-75917

Abstract

The main problem of this research is the formulation of the problem in this research, namely How is the Evaluation of the Implementation of Minimum Service Standards in the Productive Age Health Service Program at the Rimbo Kedui Community Health Center, Seluma Regency? Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the productive age health service program at the Rimbo Kedui Community Health Center aims to reduce the number of chronic diseases in people aged 15-59 years. However, the evaluation shows several obstacles. Human resources (HR) are not of sufficient standard, infrastructure is still lacking, and outreach to the community has not been effective, so community participation is low. Program implementation is often lumped in with other services, reducing its effectiveness. This program requires improvements in human resources, facilities and outreach strategies so that goals can be achieved and provide optimal benefits for the community.

Keywords: *Evaluation, Minimum Program Service Standards, Productive Age Health Services*

Abstrak

Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah rumuskan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Di Puskesmas Rimbo Kedui Kabupaten Seluma? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Program pelayanan kesehatan usia produktif di Puskesmas Rimbo Kedui bertujuan menurunkan angka penyakit kronis pada masyarakat berusia 15-59 tahun. Namun, evaluasi menunjukkan beberapa kendala. Sumber daya manusia (SDM) belum mencukupi standar, sarana prasarana masih kurang, dan sosialisasi kepada masyarakat belum efektif, sehingga partisipasi masyarakat rendah. Pelaksanaan program sering disamakan dengan layanan lainnya, mengurangi efektivitasnya. Program ini memerlukan peningkatan SDM, fasilitas, dan strategi sosialisasi agar tujuan dapat tercapai dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal Program, Pelayanan Kesehatan Usia Produktif*

PENDAHULUAN

Berdasarkan aspirasi masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokal demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Diberlakukannya otonomi daerah pemerintah berharap tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik, akan tetapi sampai saat ini pelayanan publik masih belum sepenuhnya menganut responsibilitas, bahkan terkadang representatif sehingga banyak pelayanan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan lainnya masih belum memuaskan masyarakat. Maka perlu suatu sarana yang dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan maupun evaluasi pada pelayanan yang diberikan pada masyarakat terutama pada pelayanan dasar.

Berdasarkan hal tersebut maka harus diberlakukannya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Guna meningkatkan akses, kualitas dan cakupan layanan serta tersusunnya rencana capaian standar pelayanan minimal dalam pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Karena kesehatan merupakan salah satu dari enam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Program pelayanan kesehatan usia produktif yaitu jenis program dari SPM yang memiliki ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan. Pelayanan tersebut berhak diperoleh setiap warga negara, pelayanan kesehatan pada usia produktif sasarannya yaitu untuk menanggulangi Penyakit Tidak Menular (PTM) (Azira, 2017).

Pada setiap pelayanan pasti ingin memberikan pelayanan dengan mutu yang telah ditentukan. Supaya kualitas pelayanan dapat puas dengan setiap masyarakat yang menerima pelayanan. Menurut Crout (1974: 45) Program menjaga mutu merupakan suatu cara yang sistematis dan terencana yang dilihat perlu untuk dilakukan dengan tujuan mendapatkan hasil keluaran yang meyakinkan dengan menjaga mutu pelayanan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana layanan serta memenuhi kebutuhan para penerima layanan.

Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, Peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul skripsi yaitu, “Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Di Puskesmas Rimbo Kedui Kabupaten Seluma”

Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program dampak/hasil yang dicapai. Efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program (Widoyoko, 2009).

Manfaat evaluasi mempunyai beberapa manfaat antara lain menetapkan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam pelayanan yang sedang berjalan, meramalkan kegunaan dari pengembangan usaha-usaha dan memperbaikinya, mengukur kegunaan pelayanan-pelayanan yang inovatif, meningkatkan efektifitas pelayanan, manajemen dan administrasi, kesesuaian tuntutan tanggung jawab.

Standar Pelayanan Minimal

Permenkes RI No.43 Tahun 2016 tentang Standar pelayanan minimal (SPM) menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis-jenis dan kualitas pelayanan dasar yang menjadi urusan daerah wajib yang paling sedikit dimiliki oleh setiap warga negara. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya.

Sebaliknya pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. Syarat SPM mengacu pada standar pelayanan minimal yang dapat yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat dalam pelayanan yang berkaitan dengan urusan daerah yang bersifat wajib. Jadi, SPM termasuk semua urusan wajib pemerintah daerah, tidak hanya dalam satuan pelayanan (Zaenal dan Muhibudin, 2015).

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat, target SPM harus 100% setiap tahun.

Untuk itu di penetapan indikator SPM, kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian sehingga menghapus secara bertahap jenis layanan, kualitas layanan dan sasaran. SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kerangka Pikir

Berdasarkan informasi pada Puskesmas Rimbon Seluma terdapat permasalahan yang akan berdampak pada proses pelayanan. Permasalahan tersebut meliputi : a. kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan sehingga tidak sebanding antara adanya tenaga kesehatan yang ada dan jumlah masyarakat yang harus dilayani, b. kurangnya sarana prasarana dari peralatan non medis maupun medis akibatnya untuk penyakit kronis harus dirujuk ke dalam pusat kota.

Adanya permasalahan di atas akan dikaji untuk memberikan angka keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu pelayanan yang diterapkan pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas Rimbo Kedu Seluma. Proses melakukan evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan. Dengan hal itu, peneliti menggunakan teori model CIPP yaitu (Context, Input, Process, dan Product) yang berguna untuk mengetahui tingkat tercapainya SPM pada Puskesmas Rimbo Kedu Seluma serta Mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya SPM dari target yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam (Purnawan, 2014) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi (Creswell, 2018).

Maksud penulis menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Di Puskesmas Rimbo Kedu Kabupaten Seluma.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan penelitian, dalam penelitian ini lokasi menjadi sumber informasi yang dapat mengungkap dan menggambarkan fenomena yang terjadi serta informasi yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal pada program pelayanan kesehatan usia produktif Di Puskesmas Rimbo Kedu Kabupaten Seluma.

Langkah kedua adalah melakukan analisis terhadap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Masalah yang mungkin dihadapi oleh Puskesmas Rimbo Kedu terhadap Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Di Puskesmas Rimbo Kedu Kabupaten Seluma.

Langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan dan menstandarisasi kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas Rimbo Kedu Kabupaten Seluma dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut. Ini melibatkan penjelasan rinci tentang langkah- langkah yang diambil, perubahan apa yang diterapkan, dan bagaimana kegiatan tersebut akan dilakukan secara praktis. Langkah keempat adalah melakukan pengukuran terhadap tindakan perubahan yang terjadi sebagai hasil pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks Puskesmas Rimbo Kedi, pengukuran dapat mencakup analisis data mengenai peningkatan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif yang diterapkan, dan sejauh mana kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan salah satu program yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, termasuk di Puskesmas Rimbo Kedu. Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan kesehatan yang menasar kelompok usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 59 tahun. Layanan kesehatan ini diadakan berdasarkan instruksi dari Dinas Kesehatan Seluma, yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengharuskan setiap puskesmas melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan program-program yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari program kesehatan usia produktif adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama mengingat tingginya angka penyakit kronis seperti kanker, tumor, dan penyakit tidak menular lainnya. Melalui program ini, pemerintah berupaya menurunkan angka penyakit pada usia produktif dengan memberikan layanan kesehatan yang komprehensif.

Program ini dianggap penting karena penduduk usia produktif merupakan aset penting bagi negara, yang berperan besar dalam pembangunan dan kontribusi terhadap perekonomian. Oleh karena itu, menjaga kesehatan kelompok usia ini adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah tingginya angka kematian dalam kelompok usia produktif dan memastikan mereka tetap produktif dalam berkontribusi untuk negara. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dalam aspek kesehatan, khususnya untuk kelompok usia 15-59 tahun.

Program ini dirancang untuk memberikan layanan kesehatan yang memadai, membantu masyarakat dalam menjaga kesehatan, serta mengurangi angka penyakit di kalangan usia produktif. Menurut pedoman pelaksanaan SPM, tenaga kerja yang harus dilibatkan dalam program ini adalah dokter, bidan, dan perawat. Namun, di lapangan, pelaksanaan program kesehatan usia produktif seringkali tidak melibatkan dokter karena keterbatasan waktudinas dokter di puskesmas.

Hal ini menunjukkan bahwa SDM di Puskesmas Rimbo Kedui belum memenuhi standar kuantitas yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat berdampak pada hasil pelaksanaan SPM, terutama dalam program layanan kesehatan usia produktif. Keterbatasan SDM ini bisa menghambat efektivitas program dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. menunjukkan bahwa SDM di Puskesmas Rimbo Kedui belum memenuhi standar kuantitas yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat berdampak pada hasil pelaksanaan SPM, terutama dalam program layanan kesehatan usia produktif. Keterbatasan SDM ini bisa menghambat efektivitas program dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam menunjang keberlangsungan program. Puskesmas Rimbo Kedui menggunakan mobil dinas untuk kegiatan pelayanan keliling dan menyediakan alat-alat kesehatan serta pengobatan yang diperlukan. Mobil dinas digunakan sebagai sarana untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau jauh dari pusat layanan kesehatan.

Objek atau sasaran dari program ini adalah masyarakat berusia 15-59 tahun. Puskesmas Rimbo Kedui berupaya mengenalkan program ini melalui sosialisasi di sekolah-sekolah dan kantor di wilayah kerjanya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan usia produktif. Namun, partisipasi masyarakat dalam program ini masih rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini, menunjukkan bahwa sosialisasi belum dilakukan secara efektif.

Evaluasi proses menjabarkan sejauh mana pelaksanaan operasional program terlaksana serta rincian dari proses pemberian layanan dalam program kesehatan usia produktif. Pelaksanaan program ini di Puskesmas Rimbo Kedui mirip dengan layanan kesehatan lainnya, dengan beberapa langkah khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok usia produktif.

Proses pelaksanaan program kesehatan usia produktif melibatkan beberapa tahap, dimulai dari registrasi pasien dan pengisian formulir yang telah disiapkan. Setelah registrasi, pasien langsung menuju ke gedung PONEK untuk pemeriksaan. Tim pelayanan melakukan proses anamnesis atau menanyakan keluhan pasien, dilanjutkan dengan pengecekan kondisi kesehatan pasien.

Panduan pelaksanaan SPM menetapkan bahwa program ini harus mencapai minat warga hingga 100%. Untuk mencapai target ini, diperlukan sosialisasi intensif kepada masyarakat guna menyadarkan mereka akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Langkah-langkah kegiatan yang ditetapkan dalam panduan pelaksanaan SPM meliputi skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional, konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional, pelatihan teknis petugas skrining bagi tenaga kesehatan dan kader posbindu PTM, penyediaan sarana dan prasarana skrining, pelayanan rujukan kasus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, pencatatan dan pelaporan tingkat risiko, serta monitoring dan evaluasi.

Namun, pelaksanaan program ini di Puskesmas Rimbo Kedui belum mencapai tujuan yang diharapkan. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman dari pihak puskesmas menyebabkan program ini tidak berjalan dengan baik. Dampak positif dari program ini belum dirasakan oleh masyarakat, karena partisipasi dalam program masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa strategi sosialisasi dan implementasi program perlu ditingkatkan agar dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dan memanfaatkan layanan yang disediakan.

Secara keseluruhan, program pelayanan kesehatan usia produktif di Puskesmas Rimbo Kedui masih memerlukan banyak perbaikan dalam aspek input, proses, dan produk agar

dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Diperlukan peningkatan dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai, serta strategi sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program ini. Hanya dengan demikian, tujuan dari program kesehatan usia produktif dapat tercapai dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Rimbo Kedua.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal pada jenis layanan Kesehatan usia produktif di Puskesmas Rimbo Kedua Kabupaten Seluma tahun 2024. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program sdm dalam layanan kesehatan usia produktif belum memenuhi target yang telah ditentukan serta belum berjalan secara maksimal disebabkan oleh beberapa Faktor yang menjadi penghambat proses berjalannya layanan kesehatan usia produktif Terlaksana dengan baik.

Secara umum latar belakang dilaksanakan program SPM pada jenis layanan kesehatan usia produktif di Puskesmas Rimbo Kedua bermula dari keprihatinan pemerintah terhadap kondisi masyarakat Indonesia khususnya pada usia produktif 15-59 tahun yang saat ini angka sakit pada masyarakat semakin tinggi khususnya di Kecamatan Seluma Selatan mencapai angka rata-rata 6,63%. Angka sakit tersebut disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat sehingga mendorong agar pemerintah dapat memberikan layanan kesehatan secara merata baik itu di kota maupun daerah. Sedangkan yang menjadi tujuan program ini yaitu mempromosikan kesehatan untuk mewujudkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat serta untuk menanggulangi angka sakit pada masyarakat

Pelaksanaan program layanan tersebut didukung oleh beberapa input (masukan) penunjang terlaksananya program yaitu SDM, sarana prasarana dan objek. Kuantitas Sumber daya manusia yang ada pada Puskesmas Rimbo Kedua belum memenuhi standar minimal SDM yang ada berdasarkan Standar yang ditetapkan pemerintah dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2014. Kemudian untuk ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan usia produktif, puskesmas hanya menyediakan sarana dan prasarana umum yang ada dan tidak adanya sarana khusus yang disiapkan untuk penanganan layanan ini sehingga pemberian layanan pada jenis layanan kesehatan usia produktif belum dapat berjalan secara maksimal.

Dalam menjalankan proses pelayanan kesehatan usia produktif pada Puskesmas Rimbo Kedua, sistem pelaksanaan pemberian layanan usia produktif menggunakan sistem yang sama dengan jenis program layanan lainnya. Sehingga program yang bertujuan untuk mengurangi angka sakit pada masyarakat belum dapat tercapai namun produk yang dihasilkan melalui proses layanan yang telah dilaksanakan dan ditunjang oleh beberapa faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, SDM, dan lainnya ternyata belum digunakan secara maksimal sehingga hasil dari layanan ini belum ada hasil.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Karya.
- Azira, E. 2017. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Studi Kasus Di Pulau Mapur Kecamatan Bintang Pesisir Kabupaten Bintang)*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 21-32.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Dewi, A. P., Hari, S dan Sari, L. 2013. Analisis Pengendalian Kualitas Dengan Pendekatan P.D.C.A. (Plan-Do-Check-Act) Berdasarkan Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit Pada RSUD Dr. Adhyatama Semarang (Studi Kasus Pada Instalasi Radiologi). *Journal Of Social and Politic*, 1- 12.
- Dunn, W. N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, Uchjana Onong. 2004. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Herpikus. 2012. Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar Di Kabupaten Sanggau. *Jurnal Publik*, 1(1), 1-7.
- Herwin. 2012. Analisis Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar. Artikel Intisari Tesis, 1-24.
- Khozin, M. 2010. Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 1(1), 29-56.
- Lestyoningrum, S dan Haksama. 2014. Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Malang. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 2(2), 138-140.
- Miles, M. B dan Michael. 2007. *Qualitative Data Analysis* (terjemahan). Jakarta: UI press.
- Moleong, L. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurmandi, A. 2003. Perubahan Perspektif Pemerintahan dan Implikasinya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

